BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asal usul dan pertumbuhan gerakan ekonomi berbasis agama di Indonesia sebagaimana disebutkan dalam disertasi Juliar Nasution ditandai dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) yang dipimpin oleh H. Samanhudi.[1] Berdirinya organisasi ini diawali oleh keprihatinan terhadap ketidakmampuan para pedagang batik pribumi bersaing dengan pedagang Cina dan sikap superioritas orang-orang Cina terhadap orang-orang Indonesia pascarevolusi Cina di tahun 1911.[2]

Pada periode awal, organisasi tersebut lebih *concern* terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi oleh para pedagang Islam pribumi *vis-a-vis* pedagang keturunan Tionghoa. Nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam digunakan untuk mengikat dan menyatukan kekuatan para pedagang Islam dalam menghadapi tekanan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Kebangkitan SDI dianggap sebagai simbol awal bagi keberhasilan gerakan pembaruan sistem organisasi Islam.

[1]Juliar Nasution, "Peran Sarekat Dagang Islam dalam Gerakan Ekonomi Islam Indonesia Tahun 1905-1912" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2019). Dalam catatan Deliar Noer, bahwasanya sekelompok orang Islam di Indonesia yang dipelopori oleh Tamar Djaja mengajukan bahwasanya Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh H. Samanhoeddhi agar 16 Oktober 1905 itu diakui sebagai hari permulaan kebangkitan nasional Indonesia, bukan tanggal 20 Mei 1908 sebagai hari berdirinya Budi Oetomo. Berbagai bukti otentik disampaikan namun nampaknya hal ini tak mengubah penetapan tersebut. Selanjutnya Noer menyebutkan para pendiri SDI ialah KH. Samanhoeddhi, M. Asmodimoedjo, M. Kertotaruno, M. Sumowerdojo, M. Hadi Abdulradjak. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942*, VIII (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996), 115–16.

[2]Muhamad Fajar Pramono, "Model Islamisasi Ekonomi Studi Kasus Sarekat Dagang Islam," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor* 11, no. 2 (2017): 247–66.

Hal ini terjadi karena SDI sudah memiliki Anggaran Dasar sebagai pedoman pelaksanaan organisasi.[3]

Di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto, Sarekat Dagang Islam (SDI) berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI). Melalui SI, ia menekankan pola advokasi kepada para anggotanya masyarakat pribumi yang beragama Islam akan hak ekonomi dan politik yang harus mereka dapatkan.[4] Dengan mengusung ide *sosialisme religious*,[5] Tjokroaminoto memberikan aturan berdasarkan ajaran Islam yang meliputi aspek kepemilikan harta dengan asas "sebesar-besarnya keselamatan bagi sebanyak-banyaknya orang", karena kepemilikan atas faktor produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Tidak berlebihan jika kemudian Tjokroaminoto memaknai konsep riba[6] tidak hanya sebagai unsur

[3]Anggaran Dasar yang bertanggal 11 November 1911 ini disusun oleh R.M. Tirtoadisurjo. Ia juga aktif dalam pers dan juga turut medirikan organisasi dagang Sarekat Dagang Islamiyah di Bogor tahun 1911. Lihat Noer, *Gerakan Moderen Islam Di Indonesia 1900-1942*, 116.

[4]Ismail Usman, "Sarekat Islam (SI) Gerakan Pembaruan Politik Islam," *Potret Pemikiran* 21, no. 1 (2017): 47.

[5]Dalam buku Islam dan Sosialisme, Tjokro menuliskan adanya kesalinghubungan antara paham sosialisme dengan Islam. Pertama, ia mencoba mengurai nilai-nilai daar sosialisme yang terdapat dalam ajaran Islam; kedua, ia menunjukkan bahwasnya banyak perintah dalam Islam memiliki ciri sosial; ketiga, ajaran Islam mewajibkan penganutnya untuk memperhatikan dan membantu sesama terutama mereka yang masuk dalam golongan lemah; dan yang terakhir, bahwasanya prinsip persamaan, persaudaraan dan kemerdekaan merupakan prinsip utama yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah. Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), 404. Lihat juga Nurcholish Madjid, *Islam: Kemoderenan Dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008), 92.

[6]Latar belakang perluasan konsep riba didahului oleh adanya peristiwa pasca kejatuhan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) pada tahun 1800an yang menganut sistem ekonomi kolonial. Perekonomian ini kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda yang kemudian memperkenalkan sistem perekonomian kapitalis Barat yang sarat dengan birokrasi, bank dan bunga bank. Bahkan untuk ini, respons dari organisasi Muhammadiyah adalah ingin mendirikan bank Muhammadiyah. Kemudian perhatian organisasi Nahdlatul Ulama (NU) pun terlihat dari hasil Muktamar NU pada 9-11 Oktober 1927 di Surabaya yang juga memberikan perhatian penuh terhadap persoalan muamalah seperti perbankan, perpajakan, jual beli dan sistem ekonomi Islam. Namun sayang, ide dari kedua organisasi Islam ini harus gagal karena dianggap penuh muatan SARA dan berpotensi mengganggu stabilitas politik saat itu. Lihat Syahbudi, "Pemikiran Dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia," *Jurnal Hermeneia\Vol-2-No-2-2003*, January 1, 2003, http://digilib.uin-suka.ac.id/8424/.

kelebihan pada praktik utang-piutang, tapi lebih pada tindakan semena-mena yang dilakukan dengan mengambil keuntungan yang harusnya menjadi hak seorang pekerja (*meewaarde*).[7] Melalui SI, Tjokroaminoto juga mendorong berkembanganya gerakan ekonomi masyarakat melalui pendirian puluhan koperasi, usaha dagang, dan percetakan.[8]

Di belahan bumi lain, gerakan sosial ekonomi berbasis Islam juga dapat ditemui di Malaysia dan Pakistan sekitar tahun 1940an. Namun gerakannya hanya sebatas pada pengelolaan dana jamaah haji yang menggunakan sistem *profit and loss sharing* (bagi hasil). Sistem bagi hasil ini merupakan bagian kecil dari sistem ekonomi yang diajarkan dalam muamalah Islam.[9] Secara institusional, gerakan ekonomi Islam ditandai dengan hadirnya *Islamic Rural Bank* di desa Mit Ghamr Mesir pada 1963. Berdirinya bank ini merupakan contoh hasil inisiatif dari sekelompok masyarakat setempat dalam mengatasi problem ekonomi yang sarat dengan praktek ribawi.[10]

---

[7]Cahyono Bayu Aji dan Muhammad Yafiz, "Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia (Studi Pemikiran Cendekiawan Muslim Indonesia Era Pra-Kemerdekaan – Orde Baru)," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* II, no. 2 (2017), 1.

[8]Roni Tabroni, "Sarekat Islam (1912-1916): Sebuah Gerakan Ekonomi Kerakyatan," in *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 2017, 56–64. Kuntowijoyo mencatatat bahwa kehadiran organisasi-organisasi tersebut menandakan dimulainya babak baru dalam gerakan sosial Islam di Indonesia. Ciri pokoknya adalah tokoh-tokoh yang memimpin tidak lagi berlatarbelakang pedesaan, melainkan wakil dari kelas menengah perkotaan. Selain itu bentuk organisasi modern juga sudah mulai dijalankan yang kemudian menggiring organisasi-organisasi tersebut dalam aktivitas organisasi yang selalu mengedepankan tradisi demokrasi dan partisipasi. Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, IX (Bandung: Mizan, 1999), 195–96

[9]M. Umer Chapra, Abidin B, dan Ikhwan, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 35.

[10]Lihat kata pengatar dari M. Dawam Rahardjo dalam Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Jakarta, 2003), xviii.

Seiring dengan kembalinya kesadaran umat Islam dari keterpurukan dengan ketidakpastian dalam perekonomian,[11] gerakan *Islamic economics* mulai digaungkan kembali pada Desember 1970. Pertemuan perdana dilakukan oleh para Menteri Luar Negeri dari negara-negara yang tergabung dalam OKI di Karachi Pakistan. Saat itu Menteri Luar Negeri Mesir mengajukan proposal untuk mengganti sistem keuangan berbasis bunga dengan sistem bagi hasil keuntungan maupun kerugian (*profit and loss sharing*). Pada akhirnya saat Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah pada bulan Zulkaidah 1393 H (Desember 1973) terbentuk kesepakatan untuk mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB) yang seluruh anggotanya adalah negara-negara peserta OKI itu sendiri.[12]

Paradigma pemikiran ekonomi pun turut dibenahi, demi penegakkan suatu identitas subjek yang terpisah. Konferensi internasional pertama tentang ilmu ekonomi diadakan di Mekah pada tahun 1976. Pertemuan tersebut mampu menjadi katalis pertumbuhan literatur ekonomi perspektif Islam. Khursid Ahmad, Muhammad Umar Zubair, Muhammad Nejatullah Siddiqi merupan tokoh yang berperan penting dalam mengenalkan ilmu ekonomi dengan paradigma Islam. Mereka mengenalkan secara luas tentang perilaku ekonomi yang pernah dilakukan di masa awal Islam dan bentuk sistem ekonomi yang berbeda dengan kapitalis dan

[11]Peristiwa ini ditandai dengan kalahnya Arab oleh Israel tahun 1967, yang menyebabkan para pemikir Islam mencoba untuk melakukan kritik diri serta refleksi mendalam terhadap beragam pemahaman dan cara pandang atas berbagai problem social yang dihadapi. Dimulai dari upaya menjelaskan sebab *musabab* kekalahan tersebut. Diantara sebab yang paling signifikan adalah masalah cara pandang orang Arab terhadap budaya sendiri (menyikapi *turats*) dan tantangan modernitas (menghadapi *hadatsah*). Lihat Zainal Abidin, *Rethinking Islam dan Iman* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014), 12.

[12]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 18-21. Lihat juga M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2001), 191.

sosialis. Mereka juga membahas tema tentang makna dan signifikansi riba (*usury*) dan bunga (*interest*), mengapa ia dilarang dan perlu dihapus serta memberikan metode pengganti untuk praktek yang dilarang dalam bentuk kerja sama mudharabah, musyarakah, murabahah atau jual beli, istishna dan sebagainya. Dengan kata lain, praktek-praktek berekonomi yang bebas dari perilaku riba, *gharar, maysir,* zalim dan haram.[13]

Mengikuti pergerakan yang terjadi di dunia internasional, Indonesia sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduknya Muslim, pemikiran ekonomi yang berlandaskan pada prinsip syariah tentu mendapatkan sambutan yang positif. Mengingat fakta sejarah juga menuliskan bagaimana Sarekat Dagang Islam (SDI) dan Sarekat Islam (SI) telah berkiprah dalam perjuangan ekonomi kaum Muslim pribumi dan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Seiring waktu dengan berkembangnya sikap akomodatif politik pemerintah Indonesia pada akhir tahun 1980-an, gerakan kebangkitan ekonomi yang selaras dengan prinsip Islam *bak* gayung bersambut.[14] Beberapa penelitian menyebutkan bahwa praktik penegakan ekonomi berbasis ajaran Islam di Indonesia mulai marak dilakukan sejak lahirnya izin pendirian BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada tahun 1991, yang mulai beroperasi pada Mei 1992.[15]

---

[13]Chapra, Abidin B, dan Ikhwan, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, 220.

[14]Firman Nugraha, "Gerakan Ekonomi Keagamaan Dan Politik Identitas Muslim Pedesaan," *Jurnal Bimas Islam* 11, no. 4 (2018): 696.

[15]Aminudin, *Kekuatan Islam dan pergulatan kekuasaan di Indonesia: sebelum dan sesudah runtuhnya rezim Soeharto* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 285. Lihat Nur Kholis, "Penegakan Syariat Islam di Indonesia (Perspektif Ekonomi)," *Al-Mawarid* 16 (2006): 169, https://doi.org/10.20885/almawarid.vol16.art9.

Perkembangan ini terus berlanjut seiring dengan perubahan peta politik pemerintah yang berkuasa. Pasca rezim Orde Baru, dengan dimulainya era keterbukaan dalam demokrasi—yang salah satunya ditandai dengan kebebasan dalam mengekspresikan ideologi beragama—semakin mendorong berbagai kelompok masyarakat menunjukkan berbagai ajaran Islam ke ruang publik.[16] Dinamika politik masa reformasi ini memunculkan fragmentasi sosial-politik dalam gerakan masyarakat sipil (*civil society*), dimana negara tidak lagi menjadi agen yang otoriter sebagaimana pernah terjadi pada masa Orde Baru.

Kebebasan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan gerakan sosial di Indonesia,[17] termasuk gerakan islamisasi pada bidang ekonomi. Hal ini semakin nyata dengan hadirnya regulasi yang lebih fokus mengatur tentang perbankan syariah yakni UU No. 10 tahun 1998[18] dan UU No. 23 Tahun 1999.[19] Diikuti dengan berbagai regulasi yang berhubungan dengan kerangka operasional dan kelembagaan dan pada 2001. Menyusul juga dengan didirikannya Badan Pengawas Syariah (BPS) di Bank Indonesia.[20] Diperkuat lagi dengan hadirnya Fatwa MUI No.

[16]Noorhaidi Hasan, "The Making of Public Islam: Piety, Agency, and Commodification on the Landscape of the Indonesian Public Sphere," *Contemporary Islam,* 3, 2009, 236–37.

[17]Hilman Latief, "Philanthropy and 'Muslim Citizenship' in Post-Suharto Indonesia," *Southeast Asian Studies* 5, no. 2 (August 2016): 270.

[18]UU ini berisikan pengakuan BI terhadap keberadaan bank syariah, kemudian bank konvensional dipersilakan untuk membuat kantor cabang syariah (*dual banking system*). Segera berdiri Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank IFI, Bank Bukopin, Bank Jabar, Bank Danamon, Bank BNI 46 yang juga turut membuka cabang syariah.

[19]UU ini menyatakan bahwa BI bertanggungjawab atas pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk didalamnya perbankan syariah, kemudian BI juga diberikan wewenang untuk menetapkan kebijakan moneter sesuai dengan prinsip syariah dan yang terakhir adalah pemberian izin untuk membuka kantor cabang berbasis syariah.

[20]Kholis, "Penegakan Syariat Islam di Indonesia (Perspektif Ekonomi)," 170.

1/2004 tentang keharaman bunga bank,[21] serta berbagai aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (PBI), Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan kehadiran UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah.

Pada level organisasi kemasyarakatan misalnya, dapat ditemui pada Muhammadiyah. Melalui reinterpretasi makna surah al-Mâ'ûn, Dawam Rahardjo sebagai tokoh Muhammadiyah mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran dan melakukan aksi nyata pada pemberdayaan masyarakat kecil tanpa harus mengandalkan keterlibatan pemerintah.[22] Melalui jaringan wirausahawan,[23] didirikan beberapa amal usaha Muhammadiyah seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM).[24]

Pada lapisan masyarakat pedesaan, gerakan ekonomi Islam juga hadir dalam wujud pendirian BMT (Baitul Mal wa Tamwil). Kusmanto menyatakan bahwa kehadiran BMT merupakan wujud gerakan sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang lahir dari kesadaran akan nilai-nilai ekonomi Islam. Gerakan ini menunjukkan adanya peran politik identitas yang terdapat dalam struktur sosial masyarakat pedesaan yang mayoritas beragama Islam.[25] Nugraha juga menyebutkan bahwa

[21]Lihat Fatwa DSN No.1 Tahun 2004. Lihat juga Shofwan Al Banna Choiruzzad, "Indonesia's Islamic Economy Project and The Islamic Scholars," *Procedia Environmental Science* 17 (2013): 958.

[22]M. Dawam Rahardjo, "Muhammadiyah Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Bestari*, no. 20 (2016), 2.

[23]Imamul Hakim, "Muhammadiyah's Framework on The Community Economic Empowerment," *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2018): 106–18.

[24]Dharma Setyawan, "Pengaruh Ijtihad Dan Tajdid Ekonomi Islam Muhammadiyah," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2013), 9.

[25]Thohir Yuli Kusmanto, "Gerakan Sosial Ekonomi Islam Di Pedesaan: Studi Kasus Peran Baitul Maal Wat Tamwil Di Kabupaten Sragen," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (June 24, 2016): 223–45, https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.354.

politik identitas Islam di level pedesaan, memainkan peran penting dalam gerakan ekonomi Islam di Kecamatan Arjasari.[26]

Wujud lain dari gerakan ekonomi berbasis agama juga muncul pada warga pesantren. Sebagai contoh, gerakan ekonomi yang dilakukan oleh pengasuh dan santri Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) Jawa Timur. Di tengah kesalafiyahannya, mampu mewujudkan peran dinamisnya dalam pemberdayaan ekonomi mandiri melalui pendirian koperasi pondok yang dapat menjadi sarana laboratorium pendidikan wirausaha bagi para santri.[27]

Berbagai bentuk aktivitas ekonomi Islam seperti yang dipaparkan di atas, merupakan bentuk dari gerakan ekonomi Islam yang dilahirkan dari kelompok arus besar umat Islam. Dimulai dari hadirnya Sarekat Dagang Islam (SDI), Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan sejumlah pondok pesantren seperti halnya Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) Jawa Timur. Sebagian dari gerakan ini telah menjadi sejarah tonggak bagi gerakan ekonomi yang berupaya memajukan ekonomi umat.

Perkembangan mutakhir dari gerakan ekonomi umat ini, ternyata tidak berhenti hanya pada gerakan ekonomi di atas. Belakangan muncul pula gerakan sosial ekonomi yang dapat dikatakan memiliki ‘wajah’ berbeda dengan gerakan ekonomi Islam *mainstream* di atas. Namun memiliki semangat yang sama yakni ingin “membebaskan” umat dari keterpurukan ekonomi sebagai akibat dari maraknya praktik riba dan dominasi kelompok tertentu di masyarakat. Kelompok

[26]Nugraha, “Gerakan Ekonomi Keagamaan Dan Politik Identitas Muslim Pedesaan.”, 2

[27]Moh Nadir, “Gerakan Ekonomi Pesantren (Studi Atas Pesantren Sidogiri Pasuruan),” *JURNAL IQTISAD* 4, no. 2 (2017), 45.

ini dapat disebut sebagai gerakan minoritas dalam ekonomi Islam, namun memiliki 'gaung besar' karena tumbuh dan berkembang di era keterbukaan sarana informasi dan teknologi modern seperti media sosial. Beberapa gerakan ekonomi dimaksud yaitu Masyarakat Tanpa Riba (MTR), Komunitas Muamalah, Komunitas Koperasi Syariah 212 dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Kelompok ini berskala nasional dan lokal sekaligus. Skala nasionalnya dapat dilihat pada jejaring tokoh-tokoh kelompok ini di level nasional, namun dapat juga disebut lokal mengingat eksistensi kelompok ini sangat tergantung pada kemampuan "pemain" lokalnya untuk menghidupkan aktivitas kelompoknya.

Wigati menyebutkan bahwa kehadiran gerakan ekonomi Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas banyaknya masyarakat Muslim Indonesia yang masih terjebak dengan praktik riba dan bunga.[28] Zaim Saidi, seorang mantan wartawan senior Harian Republika, juga menyatakan hal serupa, yang kemudian aktif memperkenalkan dinar dirham dan giat mengajak masyarakat untuk menggunakannya sebagai alat transaksi.[29] Komunitas Koperasi Syariah 212 termasuk gerakan paling belakangan yang terbentuk sebagai lanjutan dari aksi demonstrasi terhadap "penistaan" agama Islam pada tanggal 2 Desember 2016 yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama.[30] Data 18 Oktober 2018, komunitas Koperasi Syariah 212 sudah berjumlah 225 yang tersebar di seluruh Indonesia. Berbeda dengan KSPPS atau BMT yang bergerak dalam

[28]Sri Wigati, "Gerakan Ekonomi Berbasis Agama: Studi Perlawanan Masyarakat Tanpa Riba Di Indonesia" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), viii.

[29]Diana Ambarwati, "Dirham: Problematika Mata Uang Solusi di Tengah Krisis," *Hikmah Journal of Islamic Studies* 15, no. 1 (2020): 138.

[30]Assyari Abdullah, "Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas Dan Ijtihad Politik Alternatif," *ANIDA'* 41, no. 2 (2018): 202–12.

usaha simpanan dan pembiayaan syariah, Koperasi Syariah 212 lebih kepada pengembangan usaha di bidang retail minimarket modern[31].

Dalam lingkup wilayah yang lebih kecil, Kalimantan Selatan dengan mayoritas penduduknya beragama Islam dengan perilaku keberagamaan masyarakatnya yang khas,[32] perkembangan dari gerakan sosial ekonomi tersebut mendapatkan tempat yang baik di wilayah ini. Sebut saja misalnya, gerakan yang dilakukan oleh para pegiat Masyarakat Tanpa Riba (MTR) wilayah Kalimantan Selatan yang aktif mengenalkan visi, misi, dan kegiatan mereka, seperti yang belakangan mereka lakukan, yakni berdakwah di Pasar Terapung Lok Baintan. Pada kegiatan ini mereka menyampaikan kepada khalayak tentang bahaya utang dan riba.[33]

Kemudian gerakan yang dilakukan oleh Komunitas Muamalah yang beberapa kali mengadakan Pasar Muamalat dan menerima alat tukar berupa koin dinar, dirham, dan fulus, serta barter.[34] Tampaknya kegiatan ini pun mendapat

[31]Beberapa penelitian menyebutkan banyak warung dan pasar tradisional tutup karena tidak mampu bersaing dengan minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret yang berdiri disekitarnya. Kehadiran Koperasi Syariah 212 dengan gerai 212Mart-nya diharapkan mampu menjadi alternatif tempat belanja modern, barang produk UMKM milik anggota koperasi tersebut. Dengan menyediakan rak khusus untuk produk UMKM, menyediakan barang kulakan, diharapkan mampu menjadi mitra untuk warung yang ada disekitarnya.

[32]Lihat Rahmadi, M. Husaini Abbas, dan Abd. Wahid, "Islam Banjar: Dinamika Dan Tipologi Pemikiran Dalam Tauhid, Fikih Dan Tasawuf". Lihat Sahriansyah, *Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar* (IAIN Antasari Press, 2015). Lihat juga M. Hanafiah, "Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (August 25, 2015): 201–17. Lihat juga Ahmadi Hasan, "Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah Di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan," *AHKAM:Jurnal Ilmu Syariah* 14, no. 2 (March 19, 2015), https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1281.

[33]"NEWSVIDEO: Dakwah On The River Komunitas Masyarakat Tanpa Riba," Banjarmasin Post, accessed April 22, 2020, https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/08/19/newsvideo-dakwah-on-the-river-komunitas-masyarakat-tanpa-riba.

[34]Rifad, "Anti-Mainstream, Transaksi Pasar di Banjarmasin Gunakan Dirham dan Dinar," apahabar.com, January 4, 2020, https://apahabar.com/2020/01/anti-mainstream-transaksi-pasar-di-banjarmasin-gunakan-dirham-dan-dinar/.

sambutan yang hangat di sebagian kalangan masyarakat. Terbukti sampai saat ini pedagang yang menjadi anggota komunitas ini untuk wilayah Banjarmasin berjumlah 103 pedagang.[35] Selanjutnya gerakan yang dilakukan oleh Komunitas Koperasi Syariah 212 yang sudah memiliki lima gerai 212Mart dengan jumlah keanggotaan 892 orang (data per Oktober 2019). Juga yang menjadi perhatian banyak kalangan, terutama Dinas Kementerian Koperasi dan UMKM Kalimantan Selatan adalah Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah yang didirikan oleh jamaah pengajian Salafi, dengan pencapaian anggotanya sebanyak 1550 orang.[36]

Berbagai bentuk gerakan di atas memberikan gambaran bahwa gerakan ekonomi berdasarkan nilai-nilai agama menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di Kalimantan Selatan, meskipun pada beberapa hal berseberangan atau menyelisihi kebijakan pemerintah terutama dalam aspek keuangan yang mengedepankan lembaga perbankan sebagai intermediasi finansial. Salah satu contoh, MTR, komunitas ini masih menganggap bahwa praktik riba atau bunga—meskipun dengan menggunakan nama bagi hasil—masih terjadi di asuransi, bursa efek, pegadaian, *leasing*, perbankan dan perbankan syariah,.[37]

Komunitas Muamalah menggunakan dinar dan dirham dalam transaksi. Meski bagi sebagian kalangan hal ini dianggap utopis[38] karena bahan baku dari

---

[35]"Pasar Muamalah. NET - Home," accessed May 5, 2020, http://www.pasarmuamalah.net/.

[36]"Anggota Koperasi Syariah Arrahmah 1.550 Orang, Tersebar di Banjarmasin, Martapura, Kotabaru, Barabai," Banjarmasinpost.co.id, accessed April 8, 2019, https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/03/24/anggota-koperasi-syariah-arrahmah-1550-orang-tersebar-di-banjarmasin-martapura-kotabaru-barabai.

[37]Wigati, "Gerakan Ekonomi Berbasis Agama," 228–29.

[38]Salmy Edawati Yaacob, "Study of Implementation Gold Dinar as Currency," *World Applied Science Journal* 20 (2012), 45.

kedua jenis uang tersebut tergolong barang langka, serta berpotensi berbenturan dengan regulasi mengenai mata uang di Indonesia,[39] namun gerakan yang dilakukan komunitas ini terus berjalan.[40] Terakhir, pada Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah yang tidak menggunakan akad murabahah—lazimnya berlaku pada lembaga keuangan syariah—melainkan menggantinya dengan akad *taqsith*.[41]

Perkembangan gerakan ekonomi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mampukah gerakan-gerakan tersebut bertahan? Apakah ini merupakan langkah ingin mengulang kembali kejayaan praktik ekonomi pada masa-masa awal Islam? Atau apakah ini hanya sementara, artinya, hanya akan berjalan apabila mendapatkan momen politik yang mendukung atau ada hal lain yang juga turut berperan? Ataukah ini merupakan reaksi terhadap lembaga keuangan syariah yang selama ini dijalankan? Meski perbedaan, pertentangan dan terbukanya peluang merupakan salah satu syarat tumbuhnya sebuah gerakan, ia bukanlah faktor satu-satunya. Masih ada faktor lain, misalnya, siapa aktor dari gerakan tersebut? Apa sumber yang menjadi bahan rujukan utama mereka? Bagaimana kontrol sosial yang terjadi? Termasuk *framing* yang ditawarkan kepada para anggota gerakan sebagai bentuk upaya pemeliharaan keyakinan tersebut.[42] Lantas bagaimana pula prospek dari gerakan ekonomi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, kemudian diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif dengan mengangkat kajian

[39]Lihat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 33 ayat 1

[40]Lihat instagram ahmad21 yang memperlihatkan bahwa sampai tanggal 3 Januari 2021 ini mereka sudah mengadakan event Pasar Muamalah di wilayah Banjarmasin untuk yang ketigabelas kalinya. Sementara untuk wilayah Banjarbaru sudah yang kedua kalinya.

[41]"KOPERASI KONSUMEN 'SYARIAH ARRAHMAH' – Pertama Di Kalimantan Selatan – Transaksi Bebas Riba," accessed January 6, 2021, http://kopsyaharrahmah.co.id/.

[42]Neil J. Smelser, *Collective Behaviour and Social Movement* (New York: The FreePress, 1962), 15–16.

seputar gerakan ekonomi berbasis agama di Kalimantan Selatan dengan melakukan analisis terhadap latar belakang kehadiran, sumber, metode, dan prospek dari gerakan tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian dalam disertasi ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya gerakan ekonomi syariah di Kalimantan Selatan dengan mengambil kasus gerakan ekonomi yang dilakukan oleh komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR), Komunitas Muamalah, Komunitas Koperasi Syariah 212 dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah?
2. Bagaimana sumber dan metode dari gerakan ekonomi syariah di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh keempat komunitas tersebut?
3. Bagaimana prospek dari keempat gerakan ekonomi syariah tersebut di Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis secara mendalam gerakan sosial ekonomi syariah yang terjadi di Kalimantan Selatan dengan mengambil kasus gerakan ekonomi yang dilakukan oleh Masyarakat Tanpa Riba (MTR), Komunitas Muamalah, Komunitas Koperasi Syariah 212 dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Secara khusus ingin:

1. Memetakan latar belakang terbentuknya gerakan sosial ekonomi syariah di Kalimantan Selatan dengan mengambil kasus gerakan ekonomi yang dilakukan oleh komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR), Komunitas Muamalah, Komunitas Koperasi Syariah 212 dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.
2. Menghimpun sumber, dan memetakan metode, yang dilakukan oleh Masyarakat Tanpa Riba (MTR), Komunitas Muamalah, Komunitas Koperasi Syariah 212 dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.
3. Menemukan dan menilai prospek keempat gerakan ekonomi syariah tersebut di wilayah Kalimantan Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun signifikansi dari penelitian disertasi ini, mampu memberikan sumbangan teoretis dalam hal pemetaan (*mapping*) gerakan ekonomi kontemporer berbasis keagamaan di Kalimantan Selatan. Penelitian ini juga melengkapi teori gerakan sosial baru (*new social movement*) dengan paradigma mobilisasi sumber daya (*resource mobilization paradigm*) dan identitas kolektif (*collective identity theory*), serta teori tentang tipologi aliran gerakan yang menjadi dasar perubahan sosial ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia.

Selanjutnya penelitian disertasi ini juga akan memperkaya khazanah akademis mengenai *faith-based organization* (FBOs). Organisasi yang memiliki komitmen keagamaan yang diwujudkan dengan aksi-aksi dakwah guna memotivasi Muslim lainnya untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam dalam mengatasi ketidakadilan sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kajian ini juga ingin

memperlihatkan kemampuan Muslim kontemporer yang berupaya untuk menjadi Muslim yang baik dengan turut serta mengurangi ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, sekaligus kegamangan mereka terhadap kesyariahan lembaga-lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah di Indonesia saat ini.

Secara praksis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi para pengambil kebijakan terkait berbagai persoalan yang menjadi sumber kegelisahan para penggerak komunitas Muslim dalam melihat fenomena perekonomian Indonesia saat ini dengan memberikan solusi alternatif atas dominasi perekonomian global, yang terkadang hal tersebut berseberangan dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

E. Definisi Operasional

Penelitian disertasi ini berupaya menyelidiki gerakan sosial yang berfokus pada gerakan ekonomi sekelompok masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran (agama) Islam tentang larangan praktik riba, *gharar*, *maysir*, zalim dan haram. Dalam hal ini peneliti mengungkapkan latar belakang, sumber dan metode dari gerakan ekonomi berbasis agama. Adapun latar belakang yang dimaksud adalah alasan yang melatarbelakangi terbentuknya komunitas tersebut. Sumber yang dimaksud adalah sumber pemahaman yang dianut oleh komunitas, buku yang digunakan, ulama atau tokoh yang menjadi sumber rujukan. Selanjutnya metode yang dimaksud adalah cara pemertahanan gerakan sosial tersebut agar tetap ada

(eksis), meliputi metode sosialisasi gerakan, pembentukan komitmen dan pembangunan solidaritas organisasi.

Gerakan ekonomi berbasis agama tersebut dikaji dengan mengambil contoh kasus yang dilakukan oleh: *pertama,* Masyarakat Tanpa Riba atau biasa disingkat dengan MTR, nama dari sebuah wadah perkumpulan sekelompok individu yang melakukan gerakan sosial untuk menyadarkan masyarakat Muslim agar meninggalkan tabiat buruk dari utang piutang dan dosa besar dari riba. Sampai saat ini jumlah anggota yang tergabung dalam komunitas ini baik dalam media sosial seperti *WhatsApp Group, Telegram Group, Line Group* maupun *Facebook Group* sudah mencapai angka 70.000 orang simpatisan, tersebar di 70 wilayah kota di Indonesia dan dalam penelitian ini, peneliti mengambil kasus MTR di provinsi Kalimantan Selatan

Kedua, Komunitas Muamalah yang merupakan wadah tempat perkumpulan individu yang giat memperkenalkan dan aktif melakukan transaksi ekonomi jual beli dengan menggunakan dinar, dirham, fulus dan barter. Komunitas Muamalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Komunitas Muamalah Persemakmuran Amirat Nusantara Kalimantan Selatan yang menginduk kepada Wakala Amirat Nusantara pimpinan Zaim Saidi.

Ketiga, komunitas Koperasi Syariah 212, koperasi syariah yang tergabung dalam komunitas Koperasi Syariah 212. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Koperasi Syariah Bauntung Batuah. Koperasi Syariah Bauntung Batuah ini awal berdirinya dilatarbelakangi oleh semangat gerakan Aksi 212 dari sebagian masyarakat Kalimantan Selatan.

Keempat, Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah adalah koperasi syariah pertama di Kalimantan Selatan yang menyatakan komitmen untuk lebih *syar'i* dari lembaga keuangan, koperasi konvensional maupun lembaga pembiayaan yang berbasis syariah lainnya.

F. Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran yang dilakukan, ada banyak literatur dan kajian yang berkaitan dengan gerakan ekonomi yang muncul karena dorongan dari ajaran agama. Penelusuran dimulai dari studi yang dilakukan oleh:

1. Max Weber dalam bukunya yang berjudul *The Protestant Ethical the Spirit of Capitalism* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyoroti bagaimana dinamika perkembangan kapitalisme di Jerman. Menurutnya, perkembangan tersebut didasari oleh sikap rasionalitas manusia yang berkembang saat itu. Rasionalitas ini muncul karena dorongan dari doktrin agama (Protestan). Etika Protestan (terutama Calvinisme dan Puritan) menyatakan apabila individu ingin mencapai kebahagiaan di dunia, hal yang harus dilakukan adalah bekerja keras, penuh semangat serta hidup harus hemat.[43]
2. Tulisan dari Robert Van Niel yang dimuat dalam *The Journal of Asian Studies* merupakan review Niel terhadap bukunya Clifford Gertz yang berjudul *Peddlers and Princes; Social Change and Economic Modernization in Two*

[43]Max Weber, *Etika Protestan Dan Semangat Kapitalisme (Terj.)* (Jakarta: Serambi, 2000), 1.

Indonesian Towns. Neil menuliskan bahwa buku ini mengangkat tema mengenai perubahan sosial dan modernisasi ekonomi yang terjadi di Indonesia yakni Modjokuto Jawa Tengah. Gertz menemukan bahwa keberhasilan dalam bidang ekonomi berasal dari kaum puritan yang ia sebut dengan istilah santri. Santri-santri ini berprofesi sebagai pedagang. Menurutnya, reformisme yang terjadi dalam gerakan Islam berangkat dari doktrin yang diyakini oleh mayoritas saudagar yang ia teliti.[44]

Lebih lanjut, disaat gagasan keagamaan yang merupakan sumber nilai itu bertemu dengan faktor-faktor determinan dalam gerakan sosial, maka ini kemudian dapat mendorong munculnya gerakan perilaku ekonomi baru, gerakan ekonomi berbasis agama. Beberapa literatur yang ditemukan adalah sebagai berikut:

3. Artikel yang berjudul Model Islamisasi Ekonomi Studi Kasus Sarekat Dagang Islam yang ditulis oleh Muh. Fajar Pramono dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah Universitas Darussalama Gontor*. Pramono menyoroti pola Islamisasi ekonomi di Indonesia pada masa pra kemerdekaan dengan mengambil kasus Sarekat Dagang Islam. Dari tulisan ini diketahui pola SDI dalam perjuangannya terbagi kepada dua strategi yakni penguatan pada aspek internal dan ekternal. Dalam aspek internal, SDI membenahi perilaku para pedagang Islam yang ikut dalam organisasi mereka, diantaranya menumbuhkan sikap kemandirian dan solidaritas atau kepedulian pada sesama yang sudah barang tentu digali dari nilai-nilai keislaman dan pengembangan jiwa dagang

[44]Robert Van Niel, "Peddlers and Princes; Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns. by Clifford Geertz," *The Journal of Asian Studies*, No. 4, Vol. 23 (August 1964), 1.

ini dilakukan sejak dini. Pada sisi ekternal, SDI mengadakan kontak kerjasama dengan wirausahawan China yang bernama Kong Sing. Kemudian dalam rangka memperkuat jaringan informasi pun SDI membuat buletin Taman Perwata yang mampu bertahan selama tiga belas tahun (1902-1915).[45]

4. Roni Tabroni dengan artikel yang berjudul Sarekat Islam (1912-1916): Sebuah Gerakan Ekonomi Kerakyatan dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* menyampaikan bahwa transformasi gerakan ekonomi kerakyatan dilakukan oleh Sarekat Islam selama empat tahun. Melalui teori perilaku kolektif Smelser diperoleh bahwa transformasi SI dilakukan dalam tiga bentuk, yakni: 1) Perubahan gerakan dari gerakan ronda dan boikot menjadi mobilisasi masa yang didukung oleh surat kabar dan vergadering; 2) Perintah residen dan mobilisasi masa melalui surat kabar dan *vergadering*, membuat SI muncul di berbagai wilayah perkotaan sembari membawa edukasi bagi perubahan dalam organisasi dan kepemimpinan yang mendorong terjadinya kemajuan kegiatan perdagangan; 3) Dari sini kemudian berdirilah puluhan toko koperasi, usaha dagang, percetakan, dan usaha lainnya di berbagai wilayah. Akan tetapi, karena manajemen keuangan yang buruk akibat dari ketidakdisiplinan anggota dalam membayar iuran akibat perilaku beberapa pimpinan SI yang korup, serta persaingan dengan etnik Tionghoa dan hubungan yang buruk dengan pemerintah saat itu, ditengarai menjadi faktor pemicu gerakan ekonomi kerakyatan Sarekat Islam ini akhirnya gagal.[46]

[45]Pramono, "Model Islamisasi Ekonomi Studi Kasus Sarekat Dagang Islam.", 2
[46]Tabroni, "Sarekat Islam (1912-1916).", 3

5. Disertasi Firman Nugraha yang berjudul *Agama dan Gerakan Sosial Ekonomi Muslim Pedesaan (Penelitian terhadap Jamaah Majelis Taklim dan Baitul Mâl wat Tamwil di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung)*. Disertasi ini memperkuat teori Max Weber dan Geertz yang menyatakan bahwa hadirnya gerakan ekonomi di masyarakat itu merupakan wujud dari relasi antara perilaku ekonomi dengan pemahaman keagamaan modern. Penguatan teori tersebut, dengan mengambil kasus di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, terjadi jika terpenuhi enam faktor, yakni: (1) dukungan struktural; (2) ketegangan struktural; (3) formalisasi substansi agama yang menjadi simbol dan *framing* gerakan; (4) watak gotong royong yang ada pada masyarakat pedesaan dan jamaah majelis taklim; (5) adanya aktor dari gerakan; (6) dijalankannya prinsip-prinsip koperasi dengan sokongan regulasi.[47]
6. Disertasi yang berjudul *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, karya Amelia Fauzia memuat kajian komprehensif mengenai perjalan historis gerakan sosial ekonomi filantropi Islam di Indonesia. Disertasi ini mengungkapkan kontestasi hubungan antara agama dengan negara; antara upaya melibatkan negara dalam mengatur kegiatan filantropi dan upaya untuk mempertahankan praktek tersebut tetap berada di bawah kontrol masyarakat sipil Muslim yang menggunakan gerakan filantropi dalam melakukan perubahan sosial dan memberdayakan masyarakat di Indonesia. Hasil temuan dari disertasi ini menyatakan bahwa gerakan filantropi pada masyarakat sipil,

[47]Firman Nugraha, "Agama dan Gerakan Sosial Ekonomi Muslim Perdesaan: Penelitian terhadap Jamaah Majelis Taklim dan Baitul Mâl wat Tamwil di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung" (doctoral, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), 1 https://doi.org/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf.

jika negara kuat, wacana dan praktik filantropi Islam tetap bertahan sebagai tradisi pada akar rumput; sementara ketika negara lemah, wacana dan praktik tersebut menjadi kuat dihadapan negara. Keseimbangan antara keyakinan agama dan negara dipelihara dengan cara tersebut. Seiring perkembangan, umat Islam tidak bisa dipisahkan dari gerakan kebangkitan Islam global yang berandil dalam memperkuat identitas bagi orang Islam. Atas argumen tersebut, ketegangan antara negara dan organisasi filantropi Islam, ternyata tidak menurun dan nampaknya akan terus bertahan karena filantropi Islam terutama zakat, menjadi bagian yang semakin penting dalam identitas Muslim Indonesia.[48]

7. Artikel jurnal yang berjudul *Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer* oleh Asep Saefuddin Jahar, mengemukakan tentang fenomena gerakan ekonomi Islam di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai reformasi. Dari berbagai penelusuran terhadap literatur menunjukkan adanya perubahan orientasi gerakan ekonomi yang pada masa awal lebih menonjolkan pada semangat nasionalisme dan keagamaan dengan pelibatan kelompok Islam dan ormas, sementara di awal tahun 1990-an dan pascareformasi, lebih mengarah kepada semangat kesadaran sosial ekonomi dan pasar global bukan terletak pada islamisasi. Kemiskinan dan ketertinggalan umat Islam—terutama dalam pendidikan—menjadi faktor penting dalam gerakan ini. Gerakan ekonomi Islam tersebut juga menekankan pada aspek *entrepreneurship* untuk pengembangan

[48]Amelia Fauzia, "Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia" (The University of Melbourne, 2008), 1 https://www.researchgate.net/publication/310511665_Faith_and_the_State_A_History_of_Islamic_Philanthropy_in_Indonesia.

masyarakat. Pendirian perbankan berdasarkan prinsip syariah yang makin marak serta pembentukkan berbagai lembaga filantropi Islam merupakan wujud kesadaran untuk mengembangkan masyarakat Muslim. Dalam perkembangannya kemudian semangat keislaman ini melebur pada konteks demokratisasi dan akuntabilitas, bukan lagi semata-mata karena agama.[49]

8. Disertasi Sri Wigati yang berjudul *Gerakan Ekonomi Berbasis Agama: Studi Perlawanan Masyarakat Tanpa Riba di Indonesia*. Penelitian ini mengungkapkan latar belakang kemunculan gerakan ekonomi MTR dan strategi yang dijalankan serta tingkat keberhasilan gerakan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang munculnya gerakan ini yakni: *pertama*, keprihatinan atas masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim namun masih terjebak dalam praktek riba melalui bank konvensional dan bank syariah (dalam hal ini MTR belum dapat menunjukkan lembaga keuangan yang benar-benar syariah dan dalam praktik, mereka masih menggunakan perbankan untuk pembayaran kegiatan pelatihan sebagai sarana transfer biaya pelatihan); *kedua*, kesadaran yang muncul dari akidah Islam untuk bangkit dari keterpurukan multi dimensi, khususnya jebakan dari praktik riba. Untuk strategi yang dilakukan, penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Zenden bahwa gerakan ini masuk ke dalam kategori gerakan perlawanan, penolakan keras terhadap bunga yang disematkan pada utang dan riba. Gerakan ini bersifat reaksioner dan konservatif, bersesuaian dengan teori Stencer. Upaya untuk membangun

[49]Asep Saepuddin Jahar, "Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 39, no. 2 (December 6, 2015), 1 https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.28.

komunitas agar selalu solid adalah dengan membentuk grup di *whatsapp*. Namun penulis menyampaikan bahwa gerakan tidak dapat diikuti oleh masyarakat umum karena semua kegiatan yang dilakukan oleh MTR cenderung eksklusif dan hanya untuk mereka yang bayar. Tingkat keberhasilan gerakan MTR, menurut penulis dapat dibagi kepada: (1) terhadap anggotanya dapat diukur melalui 2 kriteria yakni sebelum bergabung dan sesudah bergabung. Ketika sudah bergabung terjadi perubahan pada pola pikir tentang bisnis, pengetahuan terhadap fikih muamalah bertambah, memiliki manajemen usaha dan memiliki inovasi baru dalam berbisnis; (2) terhadap perkembangan jumlah pegiat. Semakin ke sini, jumlah peserta makin meningkat dan makin banyak peserta yang siap berkomitmen untuk terus berdakwah untuk menyelamatkan umat dari riba.[50]

9. Artikel jurnal yang berjudul *Gerakan Sosial Anti riba sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan* ditulis oleh Rinaldi Iswan dan kawan-kawan menunjukkan bahwa gerakan fundamentalisme yang sering dimaknai secara peyoratif dalam aksi sosialnya, ternyata memiliki cara-cara produktif untuk mengajak masyarakat mengurangi riba yang dianggap banyak menyengsarakan rakyat. Di antara metode yang dilakukan adalah sosialisasi melalui media sosial dan pemberian beasiswa pendidikan bagi pengikut gerakan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial anti riba ini berupaya untuk

[50]Wigati, "Gerakan Ekonomi Berbasis Agama.", 1

mengembalikan peran agama di tengah-tengah masyarakat saat ini melalui cara meminimalisasi praktek riba di masyarakat.[51]

Dari uraian singkat terhadap telaah pustaka di atas, penulis belum menemukan kajian yang secara komprehensif membahas mengenai latar belakang, sumber, metode, dan prospek dari gerakan ekonomi berbasis agama di wilayah Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Masyarakat Tanpa Riba, Komunitas Muamalah, Komunitas Koperasi Syariah 212 dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah. Berikut secara singkat digambarkan mengenai persamaan dan perbedaannya pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Kajian Sebelumnya

No	Penulis/Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Max Weber/ Etika Protestan Dan Semangat Kapitalisme (Terj.)	Perkembangan ekonomi kapitalisme di Jerman terjadi karena perkembangan pemikiran yang didasari oleh sikap rasionalitas. Sikap ini muncul karena dorongan dari doktrin agama (Protestan). Etika Protestan (Calvinisme&Puritan) menyatakan apabila individu ingin mencapai kebahagiaan di dunia, maka yang harus dilakukan adalah bekerja keras, penuh semangat dan hidup harus hemat.	Agama sebagai sumber nilai gerakan	
2.	Robert Van Niel / Peddlers and Princes; Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns by Clifford Geertz	Keberhasilan kaum puritan santri pedagang di Mujokunto disebabkan oleh sikap reformisme dalam gerakan Islam yang berangkat dari doktrin Islam yang diyakini oleh mayoritas saudagar tersebut	Agama sebagai sumber nilai gerakan	Objek penelitian pada aspek metode, bentuk dan sumber gerakan. Lokus penelitian: Komunitas
3.	Muh. Fajar Pramono/ Model Islamisasi Ekonomi Studi Kasus Sarekat Dagang Islam	Pola perjuangan SDI terbagi kepada 2 strategi: a. penguatan pada aspek internal dengan membenahi perilaku para pedagang Islam dengan berupaya menumbuhkan sikap kemandirian, solidaritas yang digali dari nilai-nilai	Agama sebagai sumber nilai gerakan.	

[51]Laily Sakina, "Gerakan Sosial Anti Riba Sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan," *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 19, no. 1 (2019): 53–68.

		keislaman dan pengembangan jiwa dagang ini patut dilakukan sejak dini. b. pada sisi ekternal, SDI memperluas jaringan kerjasama dengan wirausahawan China yang bernama Kong Sing. Membuat bulletin Taman Perwata yang mampu bertahan selama tiga belas tahun (1902-1915)		MTR, Komunitas Muamalah, Koperasi Syariah 212 dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah di wilayah Kalimantan Selatan
4.	Roni Tabroni/ Sarekat Islam (1912-1916): Sebuah Gerakan Ekonomi Kerakyatan	Transformasi SI ada 3 bentuk, yakni: 1) Perubahan gerakan dari gerakan ronda dan boikot menjadi mobilisasi masa yang didukung oleh surat kabar dan vergadering. 2) Adanya perintah residen dan mobilisasi masa melalui surat kabar dan *vergadering*, membuat SI muncul diberbagai wilayah perkotaan membawa edukasi bagi perubahan dalam organisasi dan kepemimpinan yang mendorong terjadinya kemajuan kegiatan perdagangan. 3) Berdiri puluhan toko koperasi, usaha dagang, percetakan dan usaha lainnya di berbagai wilayah. Akan tetapi karena manajemen keuangan yang buruk akibat dari ketidakdisiplinan anggota dalam membayar iuran yang ini disebabkan oleh perilaku beberapa pimpinan SI yang korup, serta persaingan dengan etnik Tionghoa dan hubungan yang buruk dengan pemerintah saat itu.		
5.	Firman Nugraha/ Agama dan Gerakan Sosial Ekonomi Muslim Pedesaan (Penelitian terhadap Jamaah Majelis Taklim dan Baitul Mâl wat Tamwil di Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung)	Memperkuat teori Weber&Geertz bahwa hadirnya gerakan ekonomi menunjukkan terdapat relasi antara perilaku ekonomi dengan pemahaman keagamaan modern. Selanjutnya gerakan sosial ekonomi pedesaan ini juga bergantung pada dukungan struktural, ketegangan struktural, formalisasi substansi agama yang menjadi simbol dan *framing* gerakan, watak gotongroyong yang ada pada masyarakat pedesaan dan jamaah majelis taklim, adanya aktor dari gerakan serta dijalankannya prinsip-prinsip koperasi dengan sokongan regulasi	Agama sebagai sumber nilai gerakan	
6.	Amelia Fauzia/Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia	Gerakan filantropi pada masyarakat sipil menunjukkan bahwa jika negara kuat, wacana dan praktik filantropi Islam tetap bertahan sebagai tradisi di level akar rumput, sementara ketika negara lemah, wacana dan praktik tersebut menjadi kuat dihadapan negara. Keseimbangan antara keyakinan agama dan negara dipelihara dengan cara tersebut. Selanjutnya seiring perkembangan, umat Islam tidak bisa dipisahkan dari gerakan kebangkitan		

		Islam global yang berandil dalam memperkuat identitas bagi orang Islam.	
7.	Asep Saefuddin Jahar/Transformasi Gerakan Ekonomi Islam Kontemporer	Terdapat perubahan orientasi gerakan ekonomi yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan yang menonjolkan pada semangat nasionalisme dan keagamaan dengan pelibatan kelompok Islam dan ormas. Sementara di awal tahun 1990an dan pasca reformasi, lebih mengarah kepada semangat kesadaran sosial ekonomi dan pasar global bukan terletak pada Islamisasi. Kemiskinan dan ketertinggalan umat Islam pada bidang pendidikan, menjadi faktor penting dalam gerakan ini. Selanjutnya gerakan ekonomi Islam juga menekankan pentingnya *entrepreneurship* dalam pengembangan masyarakat. Dalam perkembangannya, semangat keislaman ini melebur pada konteks demokratisasi dan akuntabilitas.	
8.	Sri Wigati/ Gerakan Ekonomi Berbasis Agama: Studi Perlawanan Masyarakat Tanpa Riba di Indonesia	Munculnya dilatarbelakangi akan adanya keprihatinan atas masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim namun masih terjebak dalam praktek riba. Selanjutnya terdapat kesadaran yang muncul dari akidah Islam untuk bankit dari keterpurukan multi dimensi, khususnya jebakan dari praktik riba. Kemudian untuk strategi yang dilakukan, penelitian ini mendukung terhadap teori yang dikemukakan oleh Zenden bahwa gerakan ini masuk kedalam kategori gerakan perlawanan, penolakan keras terhadap hadirnya bunga yang disematkan pada utang dan riba. Kemudian gerakan ini bersifat reaksioner dan konservatif, bersesuaian dengan teorinya Stencer.	Agama sebagai sumber nilai gerakan dan subjek penelitian yakni gerakan MTR
9.	Rinaldi Iswan dkk/Gerakan Sosial Anti riba sebagai Gerakan Fundamentalisme Keagamaan	Gerakan sosial anti riba yang dianggap sebagai bentuk gerakan fundamentalisme telah memegang peranan dalam upaya mengembalikan peran agama di tengah-tengah masyarakat saat ini melalui cara meminimalisir beragam praktek riba di masyarakat.	Agama sebagai sumber nilai gerakan

G. Sistematika Penulisan

Disertasi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebanyak enam bab. Pada bagian pendahuluan yang merupakan bab pertama dari disertasi ini memuat

unsur-unsur penting meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bagian kedua dari disertasi ini didiskusikan kajian seputar teori gerakan sosial, meliputi hubungan antara agama dan ekonomi, muncul, berkembang dan eksistensinya sebuah gerakan sosial.

Bab ketiga dari disertasi ini memuat metode penelitian yang digunakan meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan terakhir pengecekan keabsahan data.

Pada bab keempat dipaparkan temuan penelitian yang meliputi gambaran seputar: *pertama*, seputar latar belakang; *kedua* disampaikan data mengenai sumber dan metode gerakan ekonomi di Kalimantan Selatan; dan *ketiga* prospek dari gerakan ekonomi berbasis agama di Kalimantan Selatan. Secara lebih khusus, gerakan ekonomi yang dijadikan objek material penelitian, yaitu: Masyarakat Tanpa Riba (MTR), Komunitas Muamalah, Komunitas Koperasi Syariah 212 dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

Bab kelima dari penelitian disertasi ini memuat diskusi dan pembahasan terkait dengan data-data yang ditemukan di lapangan. Diskusi dan pembahasannya meliputi latar belakang, sumber, metode yang digunakan, serta prospek dari gerakan tersebut. Lembaga yang menjadi objek diskusi yaitu Masyarakat Tanpa Riba (MTR), Komunitas Muamalah, Komunitas Koperasi Syariah 212 dan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

Terakhir pada bab keenam dari penelitian disertasi ini yaitu penutup yang isinya memuat simpulan penelitian serta rekomendasi. Simpulan yang diberikan disesuaikan dengan fokus penelitian yang ditanyakan pada bagian awal penelitian ini. Adapun rekomendasi berkenaan dengan saran-saran terkait penelitian lanjutan yang dapat dilakukan oleh promovendus selanjutnya.

Pembahasan dilengkapi dengan daftar pustaka yang dipergunakan dalam penelitian ini, lampiran-lampiran terkait, dan biodata peneliti.